

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 27 TAHUN 2018
Tanggal : 2 April 2018

No	Format	Judul
1	Format 1	SKPD Pajak Air Tanah
2	Format 2	SKPD Pajak Reklame
3	Format 3	SKKP PKB dan BBN-KB
4	Format 4	SPPT PBB-P2
5	Format 5	TBPKP
6	Format 6	Buku Register Penerbitan Ulang SKPD, SKKP, atau SPPT PBB-P2

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Jalan Abdul Muis No. 66 Telepon 3865580-3865585, Faksimile 3865788
Website: bprd.jakarta.go.id
J A K A R T A

Format 1

Kode Pos : 10160

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK AIR TANAH

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
NIK :
Kelurahan :
NPWPD :
NOPD :
No. Vak/Reg :
No. Meter :
Kode/Gol. Tarif :
Masa Pajak :

No. SKPD :

Kecamatan :
Jenis Sumur :
Jangkauan PAM :

Jakarta,

Kegiatan	Tgl.	Luas				Debit Dewatering/hari (volume/detik)	Dasar Pengenaan Pajak		Tarif Pajak (%)	Jumlah Pajak Terutang (Rp.) (DPP x Tarif) (8 x 9 x 10)
		Sisi Tegak 1	Sisi Tegak 2	Alas	Selimit Dinding		Volume Pemanfaatan (m3/bulan (1 hari = 8 jam)	Nilai Perolehan Air Tarif Non Niaga		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Dewatering										
Pajak terutang (1)										Rp
Kegiatan	Tgl.	Catatan Meter Air		Volume Pemanfaatan (m3)/bulan	Dasar Pengenaan Pajak			Tarif Pajak (%)	Jumlah Pajak Terutang (Rp.) (DPP x Tarif) (6 x 7 x 8 x 9)	
		Akhir	Awal		Pemanfaatan (m3)	Harga Dasar Air	Nilai Perolehan Air (6) x (7)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Air Tanah										
Pajak Terutang (2)										Rp
Luah yang dibatasim ³				Jatuh tempo pembayaran paling lambat tanggal			Jumlah PAT Terutang {(1) + (2)}		Rp	

Terbilang =

Perhatian :

- Pembayaran dapat dilakukan di Bank DKI, Bank BJB, Kantor Pos, bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk
- SKPD Asli harap dibawa saat melakukan pembayaran di bank atau kantor pos
- Untuk Informasi Perpajakan Daerah dapat menghubungi Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta Jl. Abdul Muis No. 66 Telp. 3865580 - 85 Fax. 3865788
- Untuk Informasi perizinan dan perbaikan dapat menghubungi Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Jl. Raya Jatibaru No. 1 Telp. (021) 34830429

Jakarta,
Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah
.....

NIP Nama



Kode Pos : 10160

Nomorator

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK REKLAME**

NOMOR

1.	Nama Pemilik Reklame	:	
2.	Alamat	:	
3.	NIK/NPWP	:	
4.	Nomor SK Penetapan Biro Reklame	:	
	Terdaftar pada Badan Pajak dan	:	
	Retribusi Daerah	:	
5.	Nomor Objek Pajak Daerah	:	
6.	Isi Teks Reklame	:	
7.	Judul	:	
8.	Tempat Pemasangan (Jl. No/No. Pol)	:	
9.	Wilayah Pemasangan	:	Kota : Kecamatan : Kelurahan : Kode Pos :
10.	Jenis Reklame	:	
11.	Reklame dipasang pada / di	:	
12.	Status Reklame	:	Jenis Reklame :
13.	Tata Letak Pemasangan	:	Status Lokasi :
14.	Ukuran Reklame	:	Panjang m x Lebar m = m ² Panjang m x Lebar m = m ² Panjang m x Lebar m = m ² Panjang m x Lebar m = m ²
15.	Ketinggian Reklame (dari tanah sampai dengan ambang atas bidang reklame)	:	m, melebihi sempadan jalan m
16.	Masa Pajak	:	hari, detik, kali
17.	Jumlah pemasangan	:	Lembar
18.	Jangka waktu pemasangan	:	Tanggal s/d Tanggal :
19.	Ketetapan pajak reklame	:	
	a. Tarif Pajak	:	
	b. Luas Reklame	:	
	c. Nilai Sewa Reklame (N&R)	:	
	1) Rincian Anggaran Biaya (RAB)	:	
	2) Nilai Strategis	:	
	d. Jumlah Pajak Terutang	:	
20.	Jatuh Tempo Pembayaran	:	
21.	Pembayaran dilakukan pada	:	☐ Bank penerima yang ditunjuk

- Tembusan :
- Lembar I Wajib Pajak
 - Lembar II Bank Penerima yang ditunjuk
 - Lembar III BPTSP
 - Lembar IV Badan Pajak dan Retribusi Daerah

Jakarta,
a.n. KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA,

.....
.....
NIP

Perhatian:	Teraan Mesin Cash Register
1. Apabila lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan di atas, maka dikenakan sanksi bunga 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.	
2. Pembayaran ini sah jika dibubuhi Teraan Cash Register/bank penerima yang ditunjuk.	
3. Pembayaran ini bukan merupakan izin pemasangan/penyelenggaraan reklame.	

[illegible]



TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

No. A

SAMSAT PROVINSI
DKI JAKARTA

NOMOR POLIS	
NAMA PERILAH	
ALAMAT	

NO. URUT			
NO. KCHIR			
NIK			
Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)			
PRIBADI	PERUSAHAAN	Jumlah	

Salah satu
1
Tanda
Bukti

REVISI
TPE
JPM
RUC
TAMBAH
KURANG
KURANG
KURANG
KURANG

REVISI
REVISI
REVISI
REVISI
REVISI
REVISI
REVISI

REVISI	
--------	--



BUKU REGISTER
PENERBITAN ULANG SKPD/SKKP/SPPT PBB P2*)

No	Nama Wajib Pajak dan NPWPD	Nomor SKPD atau SKKP atau SPPT PBB-P2*)	Tanggal Pencetakan Kembali
1	2	3	4

Mengetahui :

.....
.....

Ket
*) coret yang tidak perlu